

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks manajemen pembelajaran baik yang dilaksanakan di sekolah umum maupun madrasah, pada konteksnya masih belum melaksanakan secara baik. Hal ini terlihat dari beberapa sekolah yang dikatakan sudah maju khususnya di wilayah Cisarua Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Hal ini menjadi karena berbagai kendala yang dihadapi oleh lembaga pendidikan terutama sekolah swasta dan sekolah berbasis agama khususnya madrasah Tsanawiyah pada umumnya masih belum melaksanakan manajemen pembelajaran dengan sepenuhnya.

Ini terlihat dari sikap para guru yang sering mengabaikan dalam melengkapi administrasi yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang menjadi kewajiban guru, seperti kelengkapan Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Program Semester (Promes), Program Tahunan (Prota), Kalender Pendidikan, Agenda Guru, Absensi Siswa, Daftar Nilai dan lain-lain. Mereka sering menganggap bahwa administrasi tidak terlalu penting dalam proses pembelajaran padahal seyogyanya dengan melaksanakan manajemen pembelajaran akan membantu para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Dengan demikian permasalahan yang timbul dari tidak dilaksanakannya manajemen pembelajaran oleh guru-guru pada umumnya khususnya pembelajaran

PKn berakibat tidak tercapainya target-target yang berhubungan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran siswa di sekolah.

Jadi pada intinya kenapa penulis tertarik akan judul Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Madrasah” ini disebabkan masih banyaknya guru-guru madarasah yang tidak melaksanakan kegiatan manajemen pembelajaran pada umumnya dan khususnya pada pembelajaran PKn.

Studi awal yang dilakukan penulis dalam proses penelitian ini adalah melakukan pengamatan atau observasi terhadap obyek penelitian yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Furqon Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Ternyata setelah dilakukan studi awal tersebut ditemukan bahwa madrasah tersebut sudah melaksanakan kegiatan tersebut akan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal.

Hal ini diketahui setelah melakukan wawancara awal dengan kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Furqon didapatkan keterangan bahwa pelaksanaan manajemen pembelajaran sudah ditetapkan akan tetapi kenyataan dilapangan para guru masih saja mengabaikan kebijakan tersebut ini terlihat dari guru yang masih mengabaikan melengkapi administrasi yang menjadi kewajibannya dalam proses pembelajar di MTs Al-Furqon.

Berdasarkan observasi awal terhadap pelaksanaan dan hasil pembelajaran PKn pada MTs Al-Furqon Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa gejala permasalahan, diantaranya:

- a. Pembelajaran PKn selama ini masih cenderung monoton, berpusat satu arah dan belum divariasikan dengan metode atau model lain yang lebih variatif, misalnya model pembelajaran yang mampu mengoptimalkan seluruh

kemampuan siswa, serta yang memperhatikan perbedaan individual siswa. Hal ini menyebabkan kualitas proses belajar siswa rendah atau pasif.

- b. Kualitas hasil belajar PKn juga dibawah nilai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan yaitu 65, hal ini dibuktikan dari hasil ulangan harian yang diperoleh dari dokumentasi nilai di wali kelas, terutama kelas IX pencapaian ketuntasan belajar secara klasikal belum dapat dikatakan sebagai belajar tuntas. Karena, dari siswa kelas IX yang ada baru sekitar 45% yang telah mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan
- c. Materi pembelajaran yang terlalu padat, waktu yang terbatas, dan lemahnya sumber daya guru dalam pengembangan muatan isi dan model pembelajaran yang lebih inovatif.
- d. Proses pengembangan sikap dan tata laku, menghargai perbedaan dan keragaman budaya. Masih lemahnya HAM dan Demokrasi cenderung mati. “Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa, maka ketika salah satu temannya berpendapat siswa lain berteriak dengan kata u..u.uuh” (Observasi 20 September 2017).

Peneliti juga melakukan wawancara awal dengan beberapa siswa terhadap kondisi pembelajaran PKn di MTs Al-Furqon Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat provinsi Jawa Barat. Hasilnya adalah bahwa siswa merasa jenuh, kurang bersemangat karena proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru bersifat monoton serta kurang menyenangkan. Berikut hasil wawancara calon penulis dengan salah seorang murid kelas IX MTs Al-Furqon Kecamatan Cisarua. Tentang apa yang mereka lakukan ketika proses pembelajaran. Ia menyampaikan sebagai berikut: “ketika guru mengajar kami lebih banyak diam karena malas dan bosan. (Wawancara: 20 September 2017). Gejala-gejala di atas menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran PKn di MTs Al Furqon Cisarua belum optimal dilaksanakan.

Dari konteks pola pikir tersebut, sudah sepantasnya para pelaksana manajemen pembelajaran dan mau memperbaiki kinerja supaya target ketercapaian kurikulum dapat tercapai dengan baik. Ini bisa terlaksana apabila seluruh komponen madrasah dari level atas sampai level bawah mendukung kebijakan tersebut dengan ikhlas dan bertanggung jawab.

Dalam konteks manajemen pembelajaran, upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di sekolah guna peningkatan kualitas pembelajaran merupakan hal yang substantif, sebagai bagian dari kajian manajemen sekolah. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud adalah melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, penstafan, kepemimpinan, dan pengendalian<sup>1</sup>. Sudah tentu terminologi Dessler tersebut perlu dilakukan adaptasi dengan pentahapan proses pembelajaran, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Terminologi “pembelajaran” merupakan terjemahan dari *instruction*, yang banyak dipakai di dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik, yang menempatkan peserta didik sebagai sumber dari kegiatan. Istilah *instruction*-pun juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah peserta didik mempelajari segala sesuatu lewat berbagai macam media, seperti bahan-bahan cetak, internet, televisi, gambar, audio, dan sebagainya, sehingga semua itu mendorong terjadinya perubahan peran guru dalam mengelola proses belajar mengajar, dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar.

Dalam proses pelaksanaan manajemen pembelajaran PKn di Madrasah Tsanawiyah Al-Furqon berpedoman pada kurikulum 2013, sebab hampir seluruh sekolah yang bernaung di bawah pembinaan Departemen Agama diharuskan melaksanakan kurikulum tersebut dari tingkat Roudhatul Anfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) serta Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

---

<sup>1</sup> Dessler, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan, Manajemen Mutu Psikologi Pendidikan Para Pendidik (terjemahan dari Educational Psychology)*. (Yogyakarta : IRCiSoD.2006) h.29

Kurikulum 2013 mewujudkan kurikulum yang sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, guna mengantisipasi perkembangan jaman dan, serta untuk memberikan *guideline/acuan* bagi penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan, sesuai dengan undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional disebutkan bahwa, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, dan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang dikembangkan dengan prinsip desersifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, disebutkan bahwa standar terkait langsung dengan kurikulum adalah standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan telah diatur dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi (SI) dan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan standar isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta panduan yang disusun oleh BNSP.

Disamping itu Kurikulum 2013 (Kurtilas) adalah pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari kompetensi yang seharusnya dimiliki siswa setelah menyelesaikan pendidikan. Kurikulum harus memiliki relevansi, yaitu adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian<sup>2</sup>.

Dewasa ini kita mengenal suatu proses pembelajaran yang tradisional, baik yang berbentuk klasikal maupun dalam bentuk belajar sendiri. Dominasi guru sangat kental begitu pula dengan sumber-sumber pembelajaran yang tradisional seperti perpustakaan, dan mungkin juga sudah digunakan alat-alat bantu lainnya. Di dalam *n-generation* tentunya akan terjadi interaksi bukan hanya antara peserta didik dan pendidik tetapi juga peserta didik yang menghadapi dunia informasi yang terbentang tanpa batas. Pada usia yang sangat muda sudah tentu diperlukan

---

<sup>2</sup> Kementrian Pendidikan Nasional, *Tim Penyusun KTSP*, (Jakarta, 2014) hal. 256)

bimbingan pendidik dalam arti yang tradisional, namun demikian bimbingan tersebut semakin lama semakin menghilang dan berubah menjadi seorang fasilitator yang membuka jalan bagi peserta didik untuk mengembara (*roaming*) secara mandiri dalam dunia informasi yang tanpa tepi.<sup>3</sup>

Sebuah Kurikulum harus mampu menunjukkan Relevansi internalnya, dan menganut fleksibilitas agar keterpaduan kurikulum lebih jelas . Oleh karena itu, para pengajar yang berkualitas harus mampu melaksanakan tugasnya dan memiliki keterampilan mengakomodasi dengan mempertimbangkan berbagai jenis siswa serta kebutuhannya, serta menggunakan segala penunjang yang diwujudkan dengan tujuan pengajaran dan bahan pelajaran dalam rangka mencapai titik kulminasi pendidikan pada umumnya, proses belajar mengajar pada khususnya. Salah satu teknik penunjang dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam pembelajaran adalah pemilihan model pendekatan pembelajaran. Secara umum, pemilihan suatu model pendekatan pembelajaran dipengaruhi oleh tujuan intruksional. Hal ini mencakup; penerimaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip; aplikasi pengetahuan atau penerimaan ketrampilan dan; tujuan yang bersifat efektif yaitu berhubungan dengan perkembangan atau perubahan sikap atau perasaan.<sup>4</sup> Pengembangan muatan standar isi seharusnya tidak hanya menjawab tujuan instuksionalnya dan kebutuhan materi yang sudah ada saja, namun sering terabaikan kebutuhan siswa maupun kebutuhan zaman. Untuk menjawab dari semua ini, dengan adanya

---

<sup>3</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Bandung: Rajawali Pers, 2011, 3.

<sup>4</sup> Nurdin, Syafruddin, *Model Pembelajaran Yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Ciputat: PT. Ciputat Press Cet ke-6, 2015) hal. 3

kurikulum yang berorientasi pada kompetensi (competency based curriculum) yang memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek pembelajaran di sekolah. Konsekuensi tersebut bukan hanya pada implementasi atau proses pembelajaran akan tetapi juga pada penetapan criteria keberhasilan. Pada tataran implementasi, misalnya perubahan terjadi pada proses pembelajaran, diperlukan, penyesuaian pembelajaran dengan potensi yang sudah dimiliki peserta didik, sebagai objek dari pembelajaran. dengan berbagai keunikan, agar mampu membantu mereka dalam mengatasi kesulitan belajar, dengan memahami pendekatan pembelajaran yang digunakan dapat membimbing peserta didik secara optimal.

Setiap guru harus menyadari adanya kenyataan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan individu di kalangan para siswa. Dengan mengetahui perbedaan-perbedaan individu di kalangan para siswanya, guru dapat memilih dan menetapkan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa, lingkungan yang tersedia, serta kondisi pada saat proses pembelajaran berlangsung, yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku<sup>5</sup>.

Oleh karena penekanan dalam model pembelajaran ini adalah peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran, maka strategi konstruktivis sering disebut pengajaran yang terpusat pada peserta didik atau *student-centered instruction*. Di dalam kelas yang terpusat pada peserta didik peran guru adalah membantu peserta didik menemukan fakta, konsep atau prinsip bagi mereka sendiri, bukan memberi

---

<sup>5</sup> Sudjana, Nana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010) hal.. 7



ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas<sup>6</sup>. Dalam model pembelajaran ini yang juga diperankan oleh guru adalah menyediakan suasana yang kondusif, yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan kognitif, keterampilan motorik dan keterampilan sosialnya secara optimal.

Sebagai generasi yang sedang berkembang, peserta didik mempunyai kebutuhan untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya, dimana mereka akan hidup dan bekerja. Akibatnya, motivasi belajar peserta didik sulit ditumbuhkan dan pola belajar mereka cenderung menghafal dan mekanistik<sup>7</sup>. Proses pembelajaran yang demikian akan sulit memperoleh otentisitas hasil belajar yang memadai. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih khas lagi oleh karena berkenaan langsung dengan penanaman nilai moral. Sebagai mata pelajaran yang memiliki dimensi pendidikan moral di sekolah, PKn mengemban misi untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*), sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Salah satu unsur penting warga negara yang baik adalah memiliki dan menumbuhkembangkan karakter sesuai dengan budaya bangsa, sehingga dia akan dapat mengambil peran dalam melakukan pembangunan masyarakat.

Jika melalui mata pelajaran PKn yang mempunyai dimensi pendidikan moral di sekolah tidak terjadi upaya pembangunan karakter, hal ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan, mengingat Pendidikan Kewarganegaraan harusnya menjadi pengawal secara langsung upaya pembinaan karakter. Dikhawatirkan para peserta didik akan mengalami kesulitan dalam melakukan

---

<sup>6</sup> Slavin, *Educational Psychology: Theory into Practice*. Prentice Hall:Engelwood (liff).1997:94)

<sup>7</sup> Balzely, *The Action Framework for The Contextual Learning and Applied Academic Approach*. Jakarta: The Ministry of National Education Second Junior Secondary Education Project ADB Loan No. 1573/1574 INO Package A School Management.2003:69)



sosialisasi diri, serta mengalami hambatan pula untuk secara cerdas mengapresiasi dan memberikan solusi pada persoalan-persoalan kemasyarakatan. Jika demikian adanya akan terjadi *lost generation* dalam konteks pembangunan nasional. Hal inilah yang harus menjadi komitmen para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, untuk membuat suatu regulasi praksis Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengawal pendidikan karakter. Komitmen tersebut kemudian perlu direspon secara aktif oleh para pakar Pendidikan Kewarganegaraan untuk membuat model manajemen pembelajaran yang membawakan misi sebagai pembangunan karakter.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter/moral di sekolah. Eksistensinya PKn ini sudah tentu tidak *moral free*, melainkan *moral based*. Yang dijadikan moral dasarnya adalah Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Moralitas sebagai substansi materi mata pelajaran PKn mempunyai makna yang sangat kompleks dan relatif. Durkheim menegaskan tiga komponen dasar moralitas yaitu disiplin atau kewajiban, masyarakat, dan otonomi diri. Meskipun ketiga komponen dasar moralitas tersebut merupakan hal *inherent* dalam kehidupan manusia, akan tetapi ketiganya tidak selalu konsekuen dalam pemunculannya. Oleh karena itu, menurut Durkheim ketiga persoalan tersebut harus menjadi komponen utama dari program-program pembelajaran yang dikembangkan di sekolah. Asumsi Durkheim tentang moralitas tersebut dapat dipetik sebagai landasan filosofis dalam pelaksanaan pembelajaran PKn di sekolah. Kendatipun ketiga komponen dasar moralitas merupakan persoalan *inherent* kehidupan manusia, apalagi PKn memiliki standar acuannya yaitu moral Pancasila, namun kenyataannya tidak selalu konsekuen. Banyak perilaku warga negara Indonesia yang justru tidak mencerminkan manifestasi karakter bangsa tersebut<sup>8</sup>. Dengan demikian menciptakan kondisi pembelajaran yang mengupayakan terbinanya pembangunan karakter dalam pembelajaran PKn merupakan suatu keniscayaan. Sedangkan titik berat proses pembelajarannya tidak sekedar *information*

---

<sup>8</sup> Durkheim, *Moral Education*, (New York: The Free Press Of Glencoe, 1961) h.23

*processing* tetapi lebih merupakan *experience learning process*, yaitu proses belajar melalui pelakonan, dengan muara akhir adalah internalisasi nilai.

Literatur lama dari Blomm (1956:47-49) yang dikutip oleh Sagala menggambarkan proses internalisasi nilai yang terjadi dalam proses pembelajaran mulai dari *receiving*, *responding*, *valuing*, *organizing*, *internalizing*, sampai pada *characterizing*<sup>9</sup>.

Proses-proses tersebut merupakan hal yang alamiah terjadi pada diri peserta didik ketika melakukan adaptasi terhadap tatanan nilai yang akan diyakininya. *Receiving* merupakan proses penerimaan yaitu secara sadar dan nalar peserta didik akan merasakan kecocokan dengan kebutuhan dirinya. *Responding* merupakan tahap berikutnya yaitu memberikan respon untuk mengkaji lebih jauh, manakala tata nilai tersebut dirasakan dibutuhkan. *Valuing* merupakan tahap mengevaluasi terhadap tatanan nilai yang telah dikajinya untuk memperoleh pertimbangan apakah tata nilai tersebut akan diterima menjadi miliknya (*internalizing*), bahkan menjadi suatu keyakinan (*characterizing*). Kompleksitas penanaman nilai yang meliputi seluruh aspek yang terdapat pada diri peserta didik (*the internal side*), menjadikan proses pembelajarannya di dalam kelas membutuhkan manajemen yang tepat.

Seorang guru adalah manajer yang harus melakukan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah untuk kepentingan proses pembelajaran, sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut. Manajemen pembelajaran di kelas, merupakan salah satu aspek kajian dalam manajemen pendidikan, khususnya adalah manajemen persekolahan. Menurut Susilo, terdapat tiga dimensi penting dalam manajemen persekolahan, yaitu dimensi organisasi,

---

<sup>9</sup>. Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Tenaga Guru dan Kependidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2009) h.27

dimensi komponen pendidikan, dan dimensi proses. Dimensi organisasi berkenaan dengan struktur, kultur, dan teknologi, dimensi komponen pendidikan mencakup pendidik, peserta didik, kurikulum, biaya, sarana, dan sejenisnya, sedangkan dimensi proses berkenaan dengan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, selain juga proses pembimbingan, pelatihan, dan semacamnya<sup>10</sup>. Dengan demikian, secara substansial manajemen pembelajaran ini terjadi pada dimensi proses pendidikan di dunia persekolahan.

Sebagai sebuah proses manajemen, pembelajaran di dalam kelas haruslah terbangun dari seluruh pentahapan secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, sampai pada evaluasi/pengendalian; yang merupakan pilar-pilar dari manajemen pendidikan, dengan mengintegrasikan secara simultan anasir manajemen.

Seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam konteks manajemen pendidikan merupakan manajer pembelajaran, harus mampu mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Potensi yang dimaksud adalah berupa segala sumber daya yang ada, yang memberikan kontribusi pada berlangsungnya proses pembangunan karakter. Dalam konteks manajemen, sumber daya tersebut adalah anasir manajemen berupa *man, material, methode, money*, dan *machine*<sup>11</sup>.

Gurulah yang kemudian menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen pembelajaran; sejak perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, sampai pada evaluasi. Selain guru, yang termasuk dalam unsur manusia ini juga adalah kepala sekolah. Kendatipun kepala sekolah tidak secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran, akan tetapi dukungan dan motivasinya melalui gaya kepemimpinan yang dibawakannya akan memberikan

---

<sup>10</sup> Susilo, Eko Madyo. *Dasar dan Konsep Manajemen Pendidikan (Bahan Kuliah)*. (Semarang : Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2007) h.13

<sup>11</sup> Rachman, Maman. 2007. *Model Pembinaan Ketahanan Mental Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Kota Semarang*. Disertasi, tidak dipublikasikan. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang., 2007) h.49

pengaruh pada kreatifitas guru, khususnya guru PKn untuk melaksanakan misinya sebagai pembangunan karakter. Unsur *kedua* adalah *material*, yaitu berkenaan dengan format bahan ajar yang disajikan. Format bahan ajar akan memandu bagaimana peserta didik belajar mengapresiasi tata nilai yang diajarkan. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah saat ini yaitu Kurikulum 2013 (Kurtilas), format bahan ajar telah dirancang oleh guru dalam bentuk Rencana Pembelajaran (RP). Selain format bahan ajar, unsur material ini pun berkenaan dengan suasana dan kebiasaan sehari-hari yang terjadi di lingkungan sekolah, yang oleh penulis disebut dengan kultur sekolah. Kultur sekolah dalam berbagai ragam bentuknya seperti simbol-simbol, ungkapan-ungkapan verbal, tata pergaulan, aturan; akan ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan karakter bangsa di kalangan peserta didik. Unsur *ketiga* adalah *methode*, yang di dalam konteks proses belajar mengajar adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru memiliki makna yang penting dalam memformulasikan proses pembelajaran, yang mengarah pembentukan karakter bangsa pada peserta didik. Metode pembelajaran inipun terdapat dalam Rencana Pembelajaran yang disusun oleh guru.

Paradigma baru dalam konteks proses belajar mengajar yang menempatkan peserta didik sebagai sentral kegiatan, menuntut terjadinya perubahan pada diri guru dalam melaksanakan aktivitas mengajarnya. Pandangan yang beranggapan bahwa mengajar hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan itu sudah layak untuk ditinggalkan, karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Subiantoro, mengidentifikasi persoalan tersebut yang disandarkan pada tiga alasan penting yang mendasari perlunya ada perubahan dalam paradigma pembelajaran<sup>12</sup>. Ketiga hal itu adalah sebagai berikut.

*Pertama*, peserta didik bukan orang dewasa dalam bentuk mini, tetapi mereka adalah organisme yang sedang berkembang. Agar peserta didik dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, dibutuhkan orang dewasa yang dapat mengarahkan dan membimbing mereka agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena

---

<sup>12</sup> Subiantoro, *Konsep dan Pengembangan Pembelajaran Inovatif. Makalah, disampaikan pada Workshop Pengembangan Pembelajaran Inovatif dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru SD, SMP, dan SMA* tanggal 4 s.d. 5 Agustus 2007

itulah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang memungkinkan setiap peserta didik dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi, tugas, dan tanggung jawab guru bukan semakin sempit, namun justru semakin kompleks. Guru bukan saja dituntut untuk lebih aktif mencari informasi yang dibutuhkan, akan tetapi ia juga harus mampu menyeleksi berbagai informasi, sehingga dapat menunjukkan pada peserta didik informasi yang dianggap perlu dan penting untuk kehidupan mereka. Guru harus menjaga peserta didik agar tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang dapat menyesatkan dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Karena itu, kemajuan teknologi menuntut perubahan peran guru dalam pembelajaran. Guru tidak lagi memosisikan diri sebagai sumber belajar yang bertugas menyampaikan informasi, tetapi harus berperan sebagai pengelola sumber belajar untuk dimanfaatkan peserta didik.

*Kedua*, kemajuan yang pesat, cepat, dan kompleks dari ilmu pengetahuan mengakibatkan kecenderungan setiap orang tidak mungkin dapat menguasai setiap cabang keilmuan. Oleh karena itu, harus terjadi perubahan pandangan bahwa belajar tidak hanya sekadar menghafalkan informasi, menghafalkan rumus-rumus, tetapi bagaimana menggunakan informasi dan pengetahuan itu untuk mengasah kemampuan berpikir.

*Ketiga*, penemuan-penemuan baru khususnya dalam bidang psikologi, mengakibatkan pemahaman baru terhadap konsep perubahan tingkah laku manusia. Dewasa ini anggapan manusia sebagai organisme yang pasif yang perilakunya dapat ditentukan oleh lingkungan seperti yang dijelaskan dalam aliran behavioristik, telah banyak ditinggalkan orang. Pandangan terbaru dalam bidang psikologi mengatakan bahwa manusia adalah organisme yang memiliki potensi seperti yang dikembangkan oleh aliran kognitif holistik. Potensi itulah yang menentukan perilaku manusia. Oleh karena itu, proses pendidikan bukan lagi memberikan stimulus, akan tetapi usaha mengembangkan potensi yang dimiliki. Di sini, peserta didik tidak lagi dianggap sebagai objek, tetapi sebagai subjek belajar yang harus mencari dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan itu tidak diberikan, akan tetapi dibangun oleh peserta didik itu sendiri.

Pengajaran yang efektif berlangsung efektif dalam proses berkesinambungan, terarah berdasarkan perencanaan yang matang. Pengajaran itu

dilandasi oleh prinsip-prinsip yang fundamental yang akan menentukan apakah pengajaran itu berlangsung secara wajar dan berhasil. Beberapa pertanyaan yang mendasar adalah:

1. Apa Kegiatan yang direncanakan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Al Furqon?
2. Bagaimana pengorganisasian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Al Furqon?
3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Al Furqon?
4. Bagaimana pengawasan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Al Furqon?
5. Apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Al Furqon?
6. Bagaimana cara mengatasi hambatan dan memperkuat dukungan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Al Furqon?

Yang perlu diketahui tentang pentingnya pengembangan kurikulum bagi sebuah keberhasilan pembelajaran, fenomena sosial budaya seperti wacana plural-multikultural penting dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, mulai dari dimensi sosial, budaya, aspirasi politik dan kemampuan ekonomi, keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar juga berpengaruh terhadap kemampuan anak didik untuk berproses dalam belajar serta berpengaruh dalam mengolah informasi menjadi suatu yang diterjemahkan dalam sebagai hasil belajar. Keragaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap implementasi kurikulum yang ada baik kurikulum sebagai proses atau kurikulum sebagai hasil.

Sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran, kurikulum berisi tujuan yang dicapai, bahan yang akan disajikan, alat-alat pengajaran, dan jadwal waktu pengajaran, sebagai suatu sistem, kurikulum merupakan subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem sekolah yang menyangkut



penentuan kebijakan tentang kurikulum, susunan personalia, dan prosedur pengembangan kurikulum, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaannya. Dalam kaitannya implementasi kurikulum diarahkan kepada pencapaian tujuan. Tujuan dan materi yang hendak dicapai dalam pendidikan disusun kurikulum. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan menuju tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dengan pegangan mengenai jenis, ruang lingkup, urutan isi, serta proses pendidikan oleh karena itu kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses, sebagai pedoman pegangan guru dalam proses pembelajaran. Artinya setiap guru sebagai pelaksana dari muatan standar isi kurikulum, hendaknya betul-betul mampu untuk membuat terobosan baru sebagai langkah inovatif, menguasai perencanaan, dan melaksanakan muatan isi dari tuntutan sebuah kurikulum. Sehingga betul bermamfaat bagi masyarakat dan kebutuhan zaman. Dalam merealisasikannya orientasi pembelajaran demikian, sikap mendasar yang harus dilakukan guru adalah mengubah cara pandang terhadap kurikulum dari isi (apa yang tertuang) ke Kompetensi (bagaimana harus berpikir, belajar, bersikap, dan melakukan langkah-langkah).

Kegiatan belajar mengajar yang masih kaku dan belum mampu membangun kondisi belajar yang kondusif merupakan masalah yang menghambat keberhasilan dalam pendidikan kita. Proses belajar mengajar yang berpusat pada guru membawa kondisi pendidikan yang stagnan. Dengan kondisi demikian, diharapkan proses pembelajaran yang mendidik dan mampu membuka nalar berpikir anak-anak didik hanya.

Dengan demikian, Dalam proses pelaksanaan manajemen pembelajaran PKn di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Furqon Cisarua, Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Furqon berinisiatif melakukan tahapan perubahan yang mendasar dalam pembelajaran PKn dengan menerapkan sistem manajemen pembelajaran PKn yang diajarkan proyek percontohan dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran.

Adapun proses pelaksanaan manajemen pembelajaran PKn berpedoman pada:



## 1. Standar Isi

Dokumen KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) sangat penting bagi sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. Dokumen KI dan KD akan dijadikan acuan dalam proses pengembangan berbagai perangkat pembelajaran di kelas. Misalnya saja dokumen silabus (walaupun juga disediakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi mengembangkan sendiri juga boleh dan bagus), Prota (Program Tahunan), Promes atau Prosem (Program Semester), PRPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), hingga untuk pengembangan perangkat atau instrumen evaluasi dan penulisan buku raport.

Dokumen Standar isi yang dimaksud oleh peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 secara keseluruhan mencakup:

- Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- Beban belajar bagi peserta pendidikan dasar dan menengah
- Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan oleh muatan standar isi.
- Kelender pendidikan untuk menyelenggarakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah

Menurut peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Kelompok mata pelajaran estetika
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan

## 2. Standar Proses

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

### 3. Standar Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik; Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Berdasarkan pada PP. Nomor 32 tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan fungsi penilaian hasil belajar, adalah sebagai berikut :

- a. Bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas.
- b. Umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar.
- c. Meningkatkan motivasi belajar siswa.
- d. Evaluasi diri terhadap kinerja siswa

Permendikbud tentang standar penilaian menegaskan bahwa penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian,

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian tingkat mutu kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah.

## 2. Pendekatan Penilaian

### a. Penilaian Otentik

Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Beberapa karakteristik penilaian otentik sebagai berikut :

- (1) Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran, bukan terpisah dari proses pembelajaran.
- (2) Penilaian mencerminkan hasil proses pembelajaran pada kehidupan nyata, tidak berdasarkan pada kondisi yang ada di sekolah.
- (3) Menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar.
- (4) Penilaian bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (5) Penilaian mencakup penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar.

Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran kepribadian dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia, kemajemukan berbangsa pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi dan tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan

membayar pajak, dan sikap anti perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme . BNSP membuat beberapa acuan sebagai dasar pengembangan KTSP, diantaranya yang terkait langsung dengan kurikulum belajar mengajar dan telah mempunyai legalitas dari Departemen Pendidikan Nasional adalah Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Pada kurikulum ini satuan pendidikan memperoleh ruang seluas-luasnya untuk membuat dan mengembangkan isi kurikulum yang akan digunakan sebagai acuan dalam kegiatan proses belajar mengajar di lingkungannya. Struktur dan muatan standar isi kurikulum, kalender pendidikan serta silabus diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mengacu kepada Kurikulum 2013 ( Kurtilas).

Dari sekian banyak mata pelajaran dalam silabus yang ada atau kurikulum yang berlaku, PKn adalah salah satu mata pelajaran yang ada pada MTs Al-Furqon Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat provinsi Jawa Barat. Sekolah yang dalam kegiatan pembelajarannya juga mengacu pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran pokok di setiap tingkat kelas yang ada.

Dalam hal ini, kepala madrasah sebagai penanggung mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan yang terhadap pelaksanaan KBM secara menyeluruh baik pada seluruh mata pelajaran yang diajarkan maupun PKn khususnya. Hal berhubungan dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan pelaksanaan manajemen pembelajaran PKn yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-furqon Cisarua.

Dengan dilaksanakannya pengawasan yang baik, maka kepala madrasah bisa menilai apakah proses pelaksanaan manajemen pembelajaran PKn sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, dalam hal ini kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Furqon melakukan tindakan yang sifat membangun yaitu dengan cara memberikan pembinaan dan memberikan kesempatan bagi mata pelajaran PKn untuk mengikuti kegiatan yang sifatnya menambah wawasan bagi yang bersangkutan baik, baik melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan, MGMP PKn, Seminar dan lain sebagainya.

Keberhasilan program manajemen pembelajaran PKn tidak akan berjalan dengan tanpa tanpa dukungan yang maksimal dari semua pihak yaitu kepala madrasah, guru Pkn, siswa dan yang lainnya.

Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut, maka penulis terdorong serta terinspirasi untuk melakukan penelitian tentang: “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Madrasah (Penelitian di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Furqon Cisarua Kabupaten Bandung Barat).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian di MTs Al Furqon ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Program yang direncanakan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
2. Bagaimanakah pengorganisasian manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
5. Apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
6. Bagaimana menghilangkan hambatan dan memperkuat dukungan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada Rumusan Masalah di atas dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui program yang direncanakan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
2. Mengetahui pengorganisasian manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?

3. Mengetahui pelaksanaan manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
4. Mengetahui kontrol atau pengawasan yang dilakukan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
5. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
6. Mengetahui cara menghilangkan hambatan dan cara memperkuat dukungan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?

#### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji pelaksanaan manajemen pembelajaran PKn di MTs Al-Furqon Kecamatan Cisarua. diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pemerhati dan pelaksana pembelajaran. Manfaat secara teoritis berupa terbangunnya manajemen pembelajaran khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang ( PAIKEM ) Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, dalam upaya mengaktifkan peserta didik dan peningkatan hasil belajar peserta didik.. Sehingga sesuai dengan tujuan diinovasinya Kurikulum 2006 (KTSP).<sup>13</sup>

Sedang manfaat praktis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pendekatan manajemen pembelajaran yang inovatif pada mata pelajaran PKn untuk lebih melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Juga memberikan solusi praktis atas problematika yang muncul dalam pembelajaran PKn dan aktivitas siswa sebagai upaya peningkatan hasil pembelajaran.

Manfaat praktis lainnya adalah teratasinya rendahnya kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, kinerja guru meningkat dan guru mampu

---

<sup>13</sup> Muslich, Masnur, *Dasar Pemahaman dan Pengembangan Pedoman bagi Pengelola Lembaga Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Dewan Sekolah, dan Guru*, (Jakarta: Bina Aksara 2012). Hal. 230

melakukan improvisasi dan inovasi pembelajaran dengan manajemen pembelajaran yang baik.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Karya tulis yang berkenaan dengan kepemimpinan memang sudah cukup banyak, mulai dari karya-karya terdahulu sampai dengan karya-karya terbaru, semua itu sudah menghiasi pustaka-pustaka dan toko-toko buku yang ada. Namun hasil penelitian berupa tesis yang berkenaan dengan manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ), apa lagi khususnya yang ada di MTs Al Furqon Cisarua, tampaknya belum ada di dalam kepustakaan.

Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian, sehingga tidak terjadi plagiasi ( penjiplakan ) karya ilmiah dan untuk mempermudah fokus apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada Madrasah Tsanawiyah (Studi kasus Pembelajaran Matematika di MTs N Winong Kabupaten Pati )  
Tesis Fariqoh Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2007.
2. Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Tesis Mahmuddin Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir



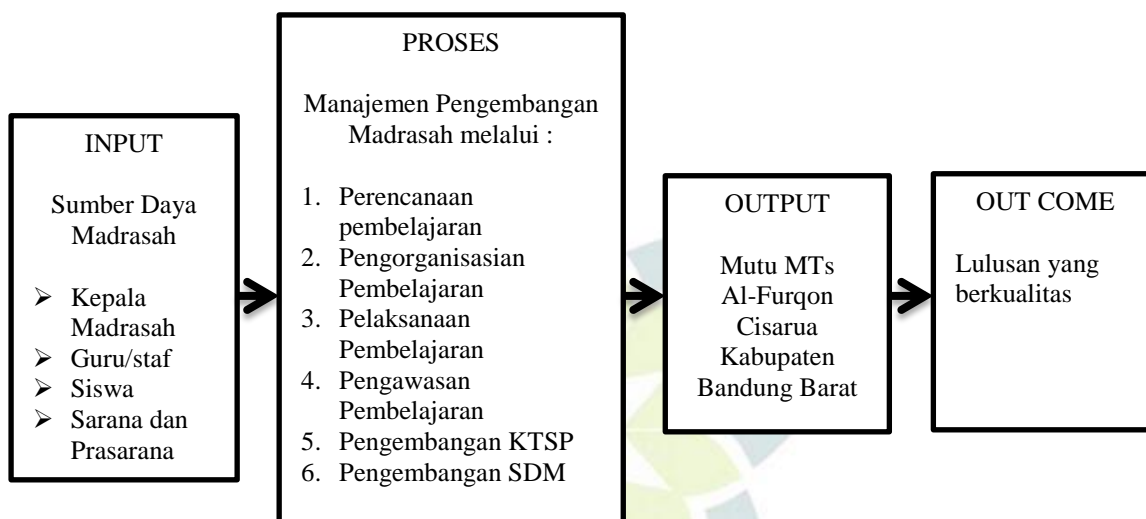
menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis dasarnya.

Kerangka berpikir ini merupakan buatan kita sendiri, bukan dari buatan orang lain. Dalam hal ini, bagaimana cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus membangun kerangka berpikir sering timbul kecenderungan bahwa pernyataan-pernyataan yang disusun tidak merujuk kepada sumber keputusan, hal ini disebabkan karena sudah habis dipakai dalam menyusun kerangka teoritis. Dalam hal menyusun suatu kerangka berpikir, sangat diperlukan argumentasi ilmiah yang dipilih dari teori-teori yang relevan atau saling terkait. Agar argumentasi kita diterima oleh sesama ilmuwan, kerangka berpikir harus disusun secara logis dan sistematis.

Fokus pada penelitian ini adalah pada manajemen pengembangan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Furqon Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Penting kiranya madrasah selalu berupaya meningkatkan mutu lembaga pendidikannya sehingga dapat melahirkan lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat maupun siswa itu sendiri. Keberhasilan kepala madrasah dalam upaya untuk meningkatkan mutu madrasah dipengaruhi oleh input dan proses yang berlangsung. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

## Kerangka Pikir Penelitian

Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn )  
( Penelitian di MTs Al Furqon Cisarua )

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa input dari penelitian ini adalah tersedianya sumber daya madrasah seperti kepala madrasah, guru dan staf yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, banyaknya siswa, kurikulum, dan sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran siswa. Sementara proses yang dilakukan dalam manajemen pengembangan madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah antara lain melalui pengembangan dalam : penerimaan peserta didik baru, KTSP, pengembangan guru dan staf,.

Perencanaan atau rencana (*planning*) dewasa ini telah dikenal oleh hampir setiap orang. Kita sudah mengenal rencana pembangunan, perencanaan produksi, perencanaan pendidikan, bahkan keluarga yang dulunya dipandang sebagai suatu yang berjalan menurut “alam” sekaran direncanakan juga yang dikenal dengan sebutan keluarga berencana

Menurut Makmur (2009:106) menegaskan bahwa perencanaan adalah memikirkan tentang apa yang akan dikerjakan dengan menyesuaikan atau dengan kata lain memadukan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang

dimiliki dan hasil yang kemungkinan akan dicapai dalam suatu aktifitas atau suatu pekerjaan yang ada pada manajemen.

Dalam konteks pembelajaran pun, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pengajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu lokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

Menurut Philip Commbs dalam Harjanto (2006: 6) perencanaan pengajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakat

Pengorganisasian merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan setelah perencanaan. Pengorganisasian merupakan proses penentu, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan menempatkan sumber daya manusia pada setiap aktifitas.

Pengorganisasian adalah aktivitas penata peralatan atau fasilitas yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam rangka penggunaan dan pelaksanaannya untuk member manfaat kepada seluruh jenjang anggota manajemen).

Menurut Wahyudi (2012: 10) organisasi pembelajaran adalah organisasi yang secara kontinyu mengembangkan kemampuan untuk terus menerus menyesuaikan diri dan berubah melakukan pembelajaran dengan menetapkan strategi inovasi, perbaikan berkelanjutan, komitmen terhadap tugas dan tujuan organisasi.

Menurut Klas Milander sebagaimana dikutip oleh Dharma dalam Wahyudi (2012: 13) bahwa organisasi pembelajaran adalah iklim kerjasama yang dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi sumber daya manusia agar mereka memiliki komitmen, integritas dan tanggung jawab secara kolektif terhadap keseluruhan kinerja organisasi.

Dengan demikian pengorganisasian pembelajaran dapat diartikan sebagai pemberdayaan sumber daya manusia agar mampu berinovasi, komitmen terhadap tugas-tugas dan tujuan organisasi.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan atau organisasi dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi nyata, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan tugas dengan optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian bahwa proses perencanaan diperlukan untuk melihat sejauhmana kemampuan guru dalam mengembangkan manajemen pembelajaran PKn dengan baik kedepannya

Pelaksanaan manajemen selalu berhubungan dengan manusia, oleh sebab itu diperlukan berbagai kemampuan dan keterampilan untuk mengarahkan, membangkitkan semangat, membimbing kearah pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang dalam hal ini melalui pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran selayaknya berpegang pada apa yang tertuang dalam perencanaan, maka guru sepatutnya peka terhadap situasi yang dihadapi, sehingga dapat menyesuaikan dengan pola tingkah lakunya dalam mengajar. Karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari proses perencanaan yang telah diuraikan di muka, tentunya sudah dalam bentuk wujud rencana atau program kegiatan. Dengan kata lain, pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini merupakan implementasi rencana atau program pembelajaran yang telah dibuat dalam proses perencanaan. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik berdasarkan perencanaan proses pembelajaran. Wujud nyatanya adalah peristiwa di ruangan

belajar dan pemberian tugas terstruktur dan tugas mandiri kepada peserta didik. Peristiwa di kelas meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pelaksanaan proses pembelajaran oleh pendidik, bertumpu kepada perencanaan yang disusun oleh satuan pendidikan dan pendidik. Kegiatan ini berangkat dari keberadaan silabus dan RPP. Pelaksanaannya akan terlihat nyata di ruang kelas, dalam bentuk interaksi dengan peserta didik, dan dalam suasana yang menyenangkan. Seperti yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 19, ayat (1) tentang Standar Nasional Pendidikan seperti berikut ini. “Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapa. Secara umum pengawasan dalam pembelajaran disekolah meliputi kegiatan mengarahkan, membimbing, menilik, mempertimbangkan dan menilai. Pengertian yang umum ini terdapat pada perkataan pengawas sebagai pekerjaan seorang pengawas atau penilik, dan juga mengenai kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis yang biasa disebut inspeksi.

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan guru dan staf yang dilakukan secara terus menerus dapat meningkatkan layanan pendidikan yang optimal kepada peserta didik yang akan berpengaruh pada prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun non akademik.

Pengelolaan keuangan dan pembiayaan menentukan terlaksananya kegiatan - kegiatan proses belajar mengajar. Keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Pengembangan sarana prasarana melalui teknologi informasi akan mendorong meningkatnya efisiensi pembelajaran. Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen sangat membantu manajemen madrasah baik dalam bidang

manajemen kesiswaan, kurikulum, keuangan, sarana prasarana dan lain-lain. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik. Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi.

Kepala sekolah memiliki peran kunci dalam mengembangkan budaya sekolah yang positif. Pengembangan ini dilakukan melalui kerjasama bersama guru-guru dan warga sekolah, dengan memberi contoh tentang nilai-nilai, norma-norma dan perilaku positif sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekolah dalam menuju sekolah yang berkualitas.

*Output* dari manajemen pembelajaran PKn di madrasah adalah meningkatnya mutu madrasah. Mutu madrasah dapat dilihat dari status madrasah yang memperoleh Akreditasi B pada awalnya dan pada periode 2 berupaya meningkatnya hasil prestasi belajar yang dicapai para siswa baik pada bidang akademik dan non akademik.

*Outcome* dari manajemen pembelajaran PKn di madrasah ini adalah banyaknya peserta didik yang setelah lulus dari MTs Al-Furqon Cisarua dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah negeri favorit yang ada di kabupaten Bandung Barat dan di luar Kabupaten.